

Nama : DIAH RACHMAWATI SYUKRI

NIM : 2523031003

TUGAS KD 12

Di sebuah daerah pemilihan dalam pemilu legislatif terakhir, angka partisipasi pemilih muda (usia 17–25 tahun) hanya mencapai 45%, jauh di bawah target nasional. Selain itu, muncul laporan dari media lokal dan LSM mengenai praktik politik uang oleh beberapa calon legislatif (caleg), terutama di wilayah pedesaan.

Salah satu caleg terpilih bahkan diketahui memberikan bantuan sembako dan uang tunai kepada warga saat masa kampanye, namun lolos dari jerat hukum karena sulitnya pembuktian dan lemahnya pengawasan oleh Bawaslu daerah.

Sementara itu, di sekolah-sekolah menengah atas di daerah tersebut, pendidikan kewarganegaraan dan IPS masih bersifat hafalan dan belum membahas isu-isu aktual tentang demokrasi, hukum, dan politik. Banyak siswa merasa tidak paham pentingnya menggunakan hak suara secara kritis dan bertanggung jawab.

Pertanyaan:

- 1. Analisislah bagaimana hubungan antara rendahnya partisipasi politik generasi muda dengan kurang optimalnya pendidikan kewarganegaraan dan IPS di sekolah!**

Jawaban:

Hubungan rendahnya partisipasi politik pemilih muda dengan kurang optimalnya pembelajaran Pancasila/Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan IPS bersifat berantai, ketika pembelajaran masih dominan hafalan dan tidak mengaitkan materi dengan isu-isu aktual seperti mekanisme pemilu, cara mengecek janji politik, korupsi, dan praktik politik uang siswa tidak berkembang menjadi warga yang kritis, tahu hak dan kewajiban, atau termotivasi untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Akibatnya generasi muda cenderung apatis atau mudah terpengaruh iming-iming praktis

(mis. bantuan sembako) karena tidak dilatih berpikir kritis tentang implikasi jangka panjang pilihan politik mereka. Penelitian dan tinjauan literatur menunjukkan bahwa model pembelajaran PKn yang kontekstual, aktif, dan berbasis pengembangan keterampilan sipil dapat meningkatkan disposisi dan partisipasi civic siswa, sebaliknya kendala implementasi PKn metode yang tradisional, bahan ajar kurang relevan, dan evaluasi yang berfokus pada hafalan menghambat tujuan tersebut (Mutriningsih, dkk 2022).

- 2. Jelaskan dampak jangka panjang dari pemberian praktik politik uang terhadap kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia!**

Jawaban:

Dampak jangka panjang pemberian praktik politik uang terhadap kualitas demokrasi dan penegakan hukum sangat serius: pertama, legitimasi wakil rakyat melemah karena wakil yang “memenangkan” suara lewat uang cenderung mengutamakan patronase dan kepentingan transaksional ketimbang kepentingan public; kedua, budaya politik uang menurunkan akuntabilitas dan mendorong klienelisasi serta dinasti politik yang mengekang persaingan sehat; ketiga, jika penindakan aparat pengawas dan hukum lemah atau sulit membuktikan kasus praktik uang, maka impunitas melekat dan norma antikorupsi terdegradasi semua ini menurunkan kualitas kebijakan publik dan kepercayaan publik pada institusi demokrasi. Studi kasus dan kajian akademik di Indonesia menemukan bahwa politik uang menjadi tradisi yang menggerogoti integritas pemilu dan menantang efektivitas penegakan hukum bila bukti sulit dikumpulkan dan pengawasan daerah terbatas.

- 3. Tinjau kasus di atas dari tiga perspektif ilmu sosial (politik, hukum, dan kewarganegaraan). Bagaimana seharusnya ketiga bidang ini saling bersinergi untuk menyelesaikan masalah tersebut?**

Jawaban:

Tinjauan dari tiga perspektif ilmu sosial (politik, hukum, kewarganegaraan) dan sinergi yang diperlukan:

- Perspektif politik, fokus pada struktur insentif politik kenapa caleg memilih memberi bantuan langsung? Karena persaingan lokal, rendahnya akses informasi pemilih, dan kebutuhan elektoral cepat. Solusi politis mencakup transparansi kampanye dan insentif bagi kandidat yang mempraktikkan kampanye berbasis program.
- Perspektif hukum, menyorot aspek aturan (UU Pemilu, pidana politik uang) dan kelemahan penegakan mis. pembuktian sulit, kapasitas pengawas daerah terbatas. Perbaikan hukum diperlukan meliputi penguatan bukti digital, pelindungan pelapor/saksi, serta koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.
- Perspektif kewarganegaraan/pendidikan, menekankan pembentukan budaya politik yang kritis lewat pendidikan formal dan nonformal.

Ketiga bidang harus bersinergi, sebagai contoh kurikulum kewarganegaraan yang relevan memberi warga (termasuk pemuda) kemampuan membaca politik; kebijakan politik/partai harus membuka ruang kampanye informasi (debate publik, akses manifesto); dan sistem hukum harus responsif serta mampu menindak pelanggaran agar efek pencegahan nyata. Sinergi operasionalnya misalnya, hasil program pendidikan (siswa yang paham hak pilih) diintegrasikan ke dalam program outreach Bawaslu di sekolah; temuan akademis tentang pola politik uang dipakai pembuat kebijakan untuk merancang aturan kampanye yang lebih ketat; aparat hukum memanfaatkan data dan laporan masyarakat yang difasilitasi sekolah/LSM.

4. **Usulkan sebuah program berbasis sekolah yang dapat meningkatkan kesadaran politik dan hukum siswa sebagai warga negara aktif dan kritis. Jelaskan unsur kurikulum, metode pembelajaran, dan strategi evaluasinya!**

Jawaban:

Program yang diusulkan yaitu Sekolah Warga Kritis (SWaK). SWaK adalah program ekstrakurikulum dan integrasi kurikulum yang menggabungkan modul PKn/IPS kontekstual, aktivitas praktik demokrasi, dan kerja sama dengan lembaga pengawas (Bawaslu setempat) serta LSM anti-korupsi untuk memberi pengalaman nyata berpolitik yang etis.

Unsur kurikulum (diintegrasikan dalam PKn/IPS dan ekstrakurikuler), berupa modul bertema “Pemilu & Hak Pilih”, “Mengenali Politik Uang dan Dampaknya”, “Hukum Pemilu dan Mekanisme Pelaporan”, dan “Literasi Media & Pemeriksaan Fakta”. Materi disusun berbasis kompetensi (keterampilan kritis, analisis sumber, advokasi warga) sehingga tidak lagi sekadar hafalan. Rujukan praktik efektivitas model pembelajaran kontekstual dan aktif mendukung pendekatan ini.

Metode pembelajaran yang digunakan aktif dan berbasis masalah (Problem-Based Learning), simulasi (simulasi pemilu sekolah kandidat, kampanye berbasis program, penghitungan suara), debat publik, proyek komunitas (survei opini warga tentang isu lokal), serta pemanfaatan studi kasus nyata dan data lokal tentang politik uang. Guru dilatih untuk metode pembelajaran aktif dan penilaian sikap; siswa dilibatkan dalam program monitoring kampanye sederhana (mis. observasi apakah caleg memasang materi kampanye yang sesuai aturan, atau adanya pemberian sembako) bekerja sama dengan lembaga pengawas setempat untuk memberi pengalaman lapangan. Penelitian menunjukkan metode pembelajaran kontekstual meningkatkan keterampilan sivik siswa.

Strategi evaluasi yang digunakan berupa kombinasi penilaian formatif dan sumatif meliputi (a) portofolio siswa (refleksi, laporan proyek, evidensi kegiatan pengawasan/pengabdian masyarakat), (b) rubrik penilaian keterampilan berpikir kritis dan argumentasi dalam debat/simulasi, (c) penilaian sikap melalui observasi guru (disposisi kewarganegaraan), dan (d) pre-post survey tentang pengetahuan dan niat partisipasi politik (mengukur perubahan sedia-pakai memilih secara kritis). Selain itu, indikator keberhasilan jangka

menengah meliputi peningkatan literasi politik siswa, peningkatan pelaporan pelanggaran pemilu oleh komunitas sekolah, dan dalam jangka panjang kenaikan partisipasi pemilih muda di daerah (diukur bekerja sama dengan KPU/Bawaslu setempat). Model evaluasi ini sejalan dengan temuan bahwa kombinasi pembelajaran aktif dan evaluasi autentik lebih efektif membentuk disposisi civic.

Referensi

Murtiningsih, I., Fatimah, S., Harsan, T., & Prasetya, A. (2022). Kendala Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menumbuhkan Civic Disposition Peserta Didik di Masa Pandemi. Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN, 9 (2), 141-147

<https://jbt.ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbt/article/view/88/50>